

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025



TAHUN
2026

KATA PENGANTAR

puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Batam telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa instansi Pemerintah wajib melaporkan kinerjanya selama 1 (satu) tahun anggaran (LKjIP) yang meliputi capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Melalui Laporan Kinerja ini dapat dikomunikasikan dan diinformasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam selama Tahun 2025. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja dengan Rencana Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja Sekretariat Kota Batam Tahun 2025.

Batam, 03 Februari 2026

Setda
Sekretaris Daerah Kota Batam



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 2 |
| 1.2.1. Tata Kerja | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 12 |
| 1.4 Landasan Hukum | 12 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| 2.1 Rencana Strategis | 16 |
| 2.1.1. Visi Pemerintah Kota Batam | 16 |
| 2.1.2. Misi Pemerintah Kota Batam Kota Batam | 17 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 21 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 39 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 46 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 46 |
| 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja | 58 |
| 3.3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi | 76 |
| 3.4. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan | 96 |
| BAB IV PENUTUP | 100 |
| 4.1. Kesimpulan | 100 |
| 4.2. Saran | 100 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Visi dan Misi | 19 |
| Tabel 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan | 22 |
| Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 39 |
| Tabel 4 Program dan Kegiatan..... | 40 |
| Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi..... | 47 |
| Tabel 6 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja..... | 59 |
| Tabel 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis | 76 |
| Tabel 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi..... | 77 |
| Tabel 9 Tabel Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Serta Kegiatan | 83 |
| Tabel 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... | 96 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan dan kinerja yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

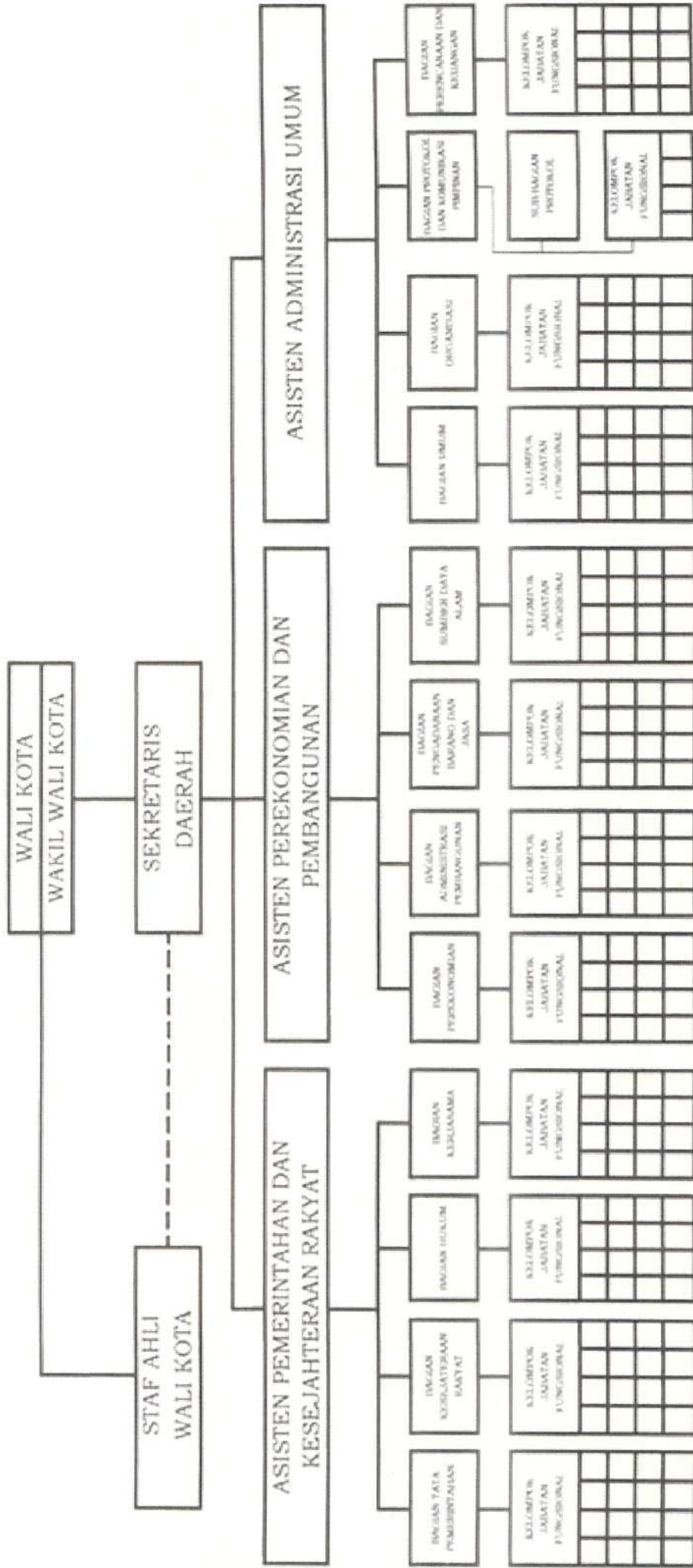
Untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang lebih jauh dijabarkan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi sangat penting.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan dan karakteristik daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas misi organisasi untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



1.2.1. Tata Kerja

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam (Kelas 15) dan membawahi 3 (tiga) Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota Batam.

Selanjutnya fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keseluruhan fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh 3 (tiga) Asisten sesuai dengan bidang serta lingkup pelaksanaannya, yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam urusan perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum dan Sekretariat DPRD serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, Kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan

kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, kebudayaan, pariwisata, koperasi usaha mikro, penanaman modal, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas dalam membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari Sekretarias Daerah, 3 Asisten dan 12 Bagian secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi :**
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 (Kelas 14), yang terdiri dari:**
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan fungsional :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;

- 3) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Terampil;
 - 5) Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 6) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama.
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana :
- 1) Analis Batas Wilayah;
 - 2) Analis pemerintahan Daerah;
 - 3) Analis pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - 4) Pengadministrasi Batas Wilayah;
 - 5) Pengadministrasi Otonomi Daerah;
 - 6) Pengadministrasi Pemerintahan;
 - 7) Pengelola Administrasi Pemerintahan;
 - 8) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Pranata Komputer Ahli pertama;
 - 4) Pranata Komputer Terampil.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Data dan Informasi;
 - 2) Analis Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - 5) Pengelola Bantuan dan Keagamaan;
 - 6) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah;
 - 7) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
 - 8) Pranata Kearsipan;
 - 9) Pranata Teknologi Informasi Komputer.
3. Bagian Kerja Sama, membawahi :
- a) Kepala Bagian Kerja Sama (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan fungsional;

- 1) Analis Hukum Ahli Pertama;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Penerjemah Ahli Pertama;
 - 6) Pranata Komputer Ahli Pertama.
- c) Kelompok Jabatan pelaksana;
- 1) Analis Kerja Sama Lintas Sektor;
 - 2) Analis Kerja Sama Luar Negeri;
 - 3) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Analis Perencanaan dan Kerja Sama;
 - 5) Pengelola Data;
 - 6) Pengelola Program dan Kegiatan.
4. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Kepala Bagian Hukum (Kelas 12);
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 1) Analis Hukum Ahli Madya;
 - 2) Analis Hukum Ahli Muda;
 - 3) Analis Hukum Ahli Pertama;
 - 4) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 6) Penyuluh Hukum pertama;
 - 7) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya;
 - 8) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
 - 9) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama;
 - 10) Pranata Komputer Ahli pertama.
- c) Kelompok Jabatan pelaksana;
- 1) Analis Advokasi hukum;
 - 2) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Analis Produk Hukum;
 - 4) Analis Sistem Informasi;
 - 5) Pengadministrasi Hukum;
 - 6) Pengelola Bantuan Hukum;

- 7) Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum;
- 8) Penyusunan Bahan Bantuan Hukum;
- 9) Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi;
- 10) Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Kelas 14), yang terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Perekonomian (Kelas 12)
 - b) Kelompok Jabatan fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli pertama;
 - 3) Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Terampil.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis kemitraan;
 - 2) Analis Pengawasan;
 - 3) Analis Perekonomian;
 - 4) Analis Perencanaan;
 - 5) Pengadministrasi Umum;
 - 6) Pengelola Data.
2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Pranata Komputer Ahli Pertama.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis Ketahanan Energi;
 - 3) Analis Lingkungan Hidup;
 - 4) Penata Keuangan;

- 5) Penelaah Data Sumber Daya Alam;
 - 6) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - 8) Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 9) Pranata Komputer Terampil.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Analis Rencana Program dan Kegiatan.
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 3) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 4) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya;
 - 5) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;
 - 6) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Klasifikasi Barang;
 - 2) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 3) Pengendali Teknologi Informasi;
 - 4) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Pengelola Pengadaan Barang Milik Negara;
 - 6) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- 7) Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;
- 8) Pengelola Sistem dan Jaringan;
- 9) Pengelola Teknologi dan Informasi;
- 10) Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- 11) Pranata kearsipan;
- 12) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

d. Asisten Administrasi Umum (Kelas 14) yang terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahi :

- a) Kepala Bagian Umum (Kelas 12);
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 - 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 6) Arsiparis Terampil;
 - 7) Perencana Ahli Muda;
 - 8) Perencana Ahli Pertama;
 - 9) Pranata Komputer Ahli pertama;
 - 10) Pranata Komputer Terampil;
 - 11) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - 3) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - 4) Analis Sistem Informasi;
 - 5) Analis Tata Usaha;
 - 6) Penata Keuangan;
 - 7) Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 8) Nahkoda Kapal Kelas V;
 - 9) Pengelola Barang Persediaan;
 - 10) Pengelola Keuangan;

- 11) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
 - 12) Pengelola Perbengkelan dan Pengujuan Kendaraan Bermotor;
 - 13) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 14) Pengelola Surat;
2. Bagian Organisasi, membawahi :
- a) Kepala Bagian Organisasi (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 - 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Terampil;
 - 6) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - 7) Pranata Komputer Ahli pertama.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis jabatan;
 - 3) Analis Kelembagaan;
 - 4) Analis Kinerja;
 - 5) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 6) Analis Organisasi;
 - 7) Analis Pelayanan Publik
 - 8) Analis Tata laksana;
 - 9) Penata Keuangan;
 - 10) Pengawas Pelayanan Publik;
 - 11) Pegelola Akuntabilitas;
 - 12) Pengolah Data Kelembagaan;
 - 13) Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
- a) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya;
 - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;

- 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli pertama;
 - 4) Perencana Ahli Madya;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata computer Ahli Pertama.
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 1) Analis Keuangan;
 - 2) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 3) Analis Perbendaharaan;
 - 4) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 5) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - 6) Bendahara;
 - 7) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris;
 - 8) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 9) Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
4. Bagian Protokol, membawahi :
- a) Kepala Bagian Protokol (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli pertama;
 - 3) Arsiparis Mahir;
 - 4) Arsiparis Terampil;
 - 5) Penerjemah Ahli Pertama;
 - 6) Pranata Hubungan Masyarakat Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Mahir.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Tata Usaha;
 - 2) Notulis Rapat;
 - 3) Pengadministrasi Keuangan;
 - 4) Pengadministrasi persuratan;
 - 5) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - 6) Pengelola Dokumentasi;
 - 7) Penyusun Naskah Rapat pimpinan.
 - d) Kepala Sub Kegiatan Protokol (Kelas 9)

- e) Analis Protokol
- f) Petugas Protokol
- g) Petugas Keamanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam dalam upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam secara terukur selama Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam selama Tahun 2025.
- 2) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam Tahun 2025.

1.4. Landasan Hukum

Landasan yang menjadi dasar dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 042);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Kode Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 99 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dengan sistematika yang dianjurkan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 - 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.4 LANDASAN HUKUM
 - 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
 - 2.1 RENCANA STRATEGIS
 - 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025
 - 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 - 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
 - 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
 - 3.3 CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : PENUTUP**
 - 4.1. KESIMPULAN
 - 4.2. SARAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam, dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang pada dasarnya menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima dari aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam, maka sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 , telah disusun rumusan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai berikut:

2.1.1. Visi Pemerintah Kota Batam

Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai dimasa depan, sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan manajemen. Visi Kota Batam periode 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2025-2029 adalah

“Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) **Madani dan Berbudaya** berarti madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal

tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

- b) **Inovatif** berarti pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) **Berkelanjutan** berarti Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian provinsi dan nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu *inclusive green economy*.
- d) **Pusat Investasi dan Pariwisata** berarti perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

2.1.2. Misi Pemerintah Kota Batam Kota Batam

Mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, serta analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan misi, Untuk mencapai visi “**Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata**”, Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui langkah strategis melalui beberapa misi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang

ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemertaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kota Batam mengemban misi ke 4 (empat) dari misi-misi Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*

Tabel 1
Visi dan Misi

| Visi : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata | | | |
|--|---|---|--|
| Misi 4: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang <i>good governance</i> | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien. | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh rakyat masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Mengoptimalkan peran koordinasi lintas PD. Mendorong penyederhanaan regulasi dan prosedur. | <ol style="list-style-type: none"> Penguatan mekanisme akuntabilitas kinerja. Penyusunan SOP koordinasi lintas PD. Evaluasi regulasi yang tidak relevan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing | <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan koordinasi program pembangunan lintas sektor. Menguatkan tata kelola PBJ (pengadaan barang/jasa) | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan lintas PD. Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa. Dukungan percepatan realisasi kegiatan prioritas pembangunan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan. | <ol style="list-style-type: none"> Penguatan pelayanan administratif lintas PD. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Mendorong manajemen kinerja berbasis hasil 3. Memperkuat transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan | <ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas produk hukum dan fasilitasi MoU. 3. Penerapan evaluasi kinerja berbasis output. 4. Pengembangan SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan |
|--|--|--|---|

Sumber: RPJMD KOTA BATAM 2025-2029

2.2. Tujuan dan Sasaran

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretariat Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja suatu Instansi Pemerintah yang dapat menunjang Visi dan Misi Walikota Batam. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Batam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Batam, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pada 12 Bagian yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM Kota Batam**

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 263.579.126.049 | 270.810.337.027 | 284.087.168.564 | 282.809.088.079 | 286.505.580.761 | 289.658.389.672 | | | | | | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 263.579.126.049 | 270.810.337.027 | 284.087.168.564 | 282.809.088.079 | 286.505.580.761 | 289.658.389.672 | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 124.284.515.049 | 131.671.706.677 | 147.137.168.564 | 145.111.838.079 | 148.363.380.761 | 150.903.389.672 | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Indeks) | 90.26 | 90.26 | 90.29 | 90.32 | 90.35 | 90.38 | 90.42 | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan | Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai) | 71.71 | 72.46 | 74.11 | 75.21 | 77.21 | 80.21 | 82.21 | | | | | | | |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 193.344.000 | 216.966.700 | 434.370.000 | 466.695.000 | 501.715.200 | 539.631.000 | | | | | | | |
| | Tersusunnya Dokumen perencanaan, dan penganggaran, dan evaluasi Sekretariat Daerah Kota Batam | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 106.258.000 | 125.664.000 | 212.120.000 | 233.332.000 | 256.665.200 | 282.331.000 | | | | | | | |
| | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SUBOUTPUT OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|--|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | (3) | (4) | (5) | 87.086.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Saluran Laporan) | | 1 | 1 | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | | 91.302.700 | | 222.250.000 | | 233.363.000 | | 245.050.000 | | 257.300.000 | | |
| | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Saluran Laporan) | | NA | NA | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 55.287.953.967 | | 55.282.197.367 | | 67.810.316.564 | | 63.760.707.079 | | 64.853.941.561 | | 66.175.355.672 | | |
| | Terlaksananya layanan administrasi keuangan | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 55.059.413.967 | | 55.053.657.367 | | 67.558.922.564 | | 63.484.074.079 | | 64.549.755.561 | | 65.840.750.672 | | |
| | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 215 | 215 | | 308 | 338 | 343 | 343 | 348 | 348 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 228.540.000 | | 228.540.000 | | 251.394.000 | | 276.633.000 | | 304.186.000 | | 334.605.000 | | |
| | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Saluran Dokumen) | | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 178.676.000 | | 178.676.000 | | 785.639.000 | | 819.232.000 | | 854.031.000 | | 890.095.000 | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.392.000 | 330 | 312.873.000 | 340 | 312.873.000 | 350 | 322.354.000 | 360 | 331.835.000 | - |
| 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang) | NA | NA | 14 | 178.676.000 | 482.247.000 | 39 | 506.359.000 | 44 | 506.359.000 | 49 | 531.677.000 | 54 | 558.261.000 | - |
| 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang) | 14 | 178.676.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 12.361.013.440 | 100% | 14.951.412.500 | 19.700.364.000 | 100% | 19.931.137.000 | 100% | 19.931.137.000 | 100% | 20.371.629.000 | 20.687.763.000 | 20.687.763.000 | - |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket) | 7 | 2.123.127.000 | 7 | 2.552.382.700 | 3.676.599.000 | 7 | 3.586.897.000 | 7 | 3.586.897.000 | 7 | 3.700.504.000 | 3.778.514.000 | 3.778.514.000 | - |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.561.957.600 | | 6.016.467.800 | 9.159.779.000 | | 9.342.975.000 | | 9.342.975.000 | | 9.529.834.000 | 9.625.132.000 | 9.625.132.000 | - |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket) | 7 | 7 | 5 | 7 | 727.527.000 | 743.916.000 | 758.794.000 | 773.970.000 | 789.450.000 | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan Paket) | 3 | 3 | 3 | 5.655.035.840 | 6.120.070.000 | 6.242.471.000 | 6.367.321.000 | 6.494.667.000 | - | - | - | - | - | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan Laporan) | 12 | 12 | 12 | 5.120.555.000 | 11.045.185.200 | 5.951.450.000 | 7.126.450.000 | 7.201.450.000 | - | - | - | - | - | |
| 4.01.01.2.07 | Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Sekretariat Daerah | Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 484.095.000 | 8.404.570.000 | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | - | - | - | - | - | |
| 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | 2 | 2 | 1 | 0 | 718.252.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | |
| | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | 2 | 2 | 1 | 0 | 718.252.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | 751.450.000 | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SUBREGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|--------|------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan Unit) | 245 | 977.109.000 | 413.191.400 | 76 | 85 | 85 | 1.000.000.000 | 1.050.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | - |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan Unit) | 160 | 3.659.351.000 | 1.509.171.800 | 56 | 70 | 70 | 2.200.000.000 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.275.000.000 | 2.300.000.000 | - | |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Serentariat Daerah Kota Batam | Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase) | 100% | 15.241.248.040 | 13.176.420.852 | 100% | 100% | 100% | 15.550.000.000 | 15.900.000.000 | 15.900.000.000 | 16.250.000.000 | 16.250.000.000 | 16.475.000.000 | - | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan) | 12 | 7.879.570.000 | 8.025.926.600 | 12 | 12 | 12 | 8.200.000.000 | 8.400.000.000 | 8.400.000.000 | 8.600.000.000 | 8.600.000.000 | 8.700.000.000 | - | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan) | 12 | 576.889.000 | 1.117.526.500 | 12 | 12 | 12 | 750.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 875.000.000 | - | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan) | 12 | 6.784.789.040 | 4.032.967.752 | 12 | 12 | 12 | 6.600.000.000 | 6.700.000.000 | 6.700.000.000 | 6.800.000.000 | 6.800.000.000 | 6.900.000.000 | - | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|--|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|--|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 24.220.426.273 | 24.183.398.929 | 24.870.629.000 | 25.381.747.000 | 25.893.199.000 | 26.204.994.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya pemeliharaan BMD Sekretariat Daerah Kota Batam | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 352.960.000 | 351.760.000 | 370.629.000 | 381.747.000 | 393.199.000 | 404.994.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit) | 9 | 9 | | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 15.953.168.000 | 14.993.511.900 | 16.250.000.000 | 16.500.000.000 | 16.750.000.000 | 17.000.000.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan periznannya (Dengan Satuan:Unit) | 120 | 120 | | | | | | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | | | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 0 | 2.057.145.000 | 2.160.000.000 | 2.268.000.000 | 2.382.000.000 | 2.430.000.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit) | | 859 | | | | | | 825 | 839 | 849 | 859 | 869 | | | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 7.914.298.273 | 6.780.982.029 | 6.090.000.000 | 6.232.000.000 | 6.368.000.000 | 6.370.000.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Dengan Satuan:Unit) | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------|--|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | (3) | (4) | 6.182.189.929 | 6.524.505.829 | 6.319.400.000 | 6.410.870.000 | 6.472.415.000 | 6.534.100.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.534.100.000 | |
| | Terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima layanan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 4.023.100.129 | 4.023.100.129 | 4.050.000.000 | 4.100.000.000 | 4.150.000.000 | 4.200.000.000 | | | | | | | 4.200.000.000 | |
| | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 28.000.000 | 28.000.000 | 29.400.000 | 30.870.000 | 32.415.000 | 34.100.000 | | | | | | | 34.100.000 | |
| | Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 2.131.089.800 | 2.473.405.700 | 2.240.000.000 | 2.280.000.000 | 2.290.000.000 | 2.300.000.000 | | | | | | | 2.300.000.000 | |
| | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.170.676.500 | 4.760.444.500 | 4.200.000.000 | 4.245.000.000 | 4.275.000.000 | 4.335.000.000 | | | | | | | 4.335.000.000 | |
| | Terlaksananya fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|--|---|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|--------|------|------------|--|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2020 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan Paket) | | 2.683.840.700 | 2.694.115.500 | 2.700.000.000 | 2.725.000.000 | 2.750.000.000 | 2.775.000.000 | 2.750.000.000 | 2.785.000.000 | | | | | | |
| | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan Paket) | | 1.486.835.800 | 2.066.329.000 | 1.500.000.000 | 1.520.000.000 | 1.525.000.000 | 1.550.000.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Nilai Kematangan Organisasi (Dengan Satuan:Angka) | 46 | 812.327.900 | 822.327.900 | 935.000.000 | 1.015.000.000 | 1.085.000.000 | 1.135.000.000 | | | | | | | | |
| | meningkatnya level kematangan organisasi | | 46 | 46.5 | 47. | 47.5 | 48 | 48.5 | | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan: Dokumen) | | 195.822.000 | 205.822.000 | 250.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan: Laporan) | | 233.416.000 | 233.416.000 | 245.000.000 | 255.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Dokumen) | | 98.034.000 | 98.034.000 | 115.000.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 145.000.000 | | | | | | | | |
| | Tersedianya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 236.850.900 | 236.850.900 | 250.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 | 295.000.000 | | | | | | | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dengan Salinan Dokumen) | 1 | 1 | 48.205.000 | | 48.205.000 | | 75.000.000 | | 85.000.000 | | 105.000.000 | | 115.000.000 | |
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Salinan Dokumen) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | 516.104.000 | | 530.170.900 | | 580.000.000 | | 630.000.000 | | 680.000.000 | | 725.000.000 | |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan Laporan) | 50 | 50 | 317.354.000 | | 305.149.400 | | 375.000.000 | | 395.000.000 | | 410.000.000 | | 425.000.000 | |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan Laporan) | 36 | 36 | 197.455.000 | | 223.750.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | | 175.000.000 | | 195.000.000 | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan Laporan) | 2 | 2 | 1.295.000 | | 1.271.500 | | 75.000.000 | | 85.000.000 | | 95.000.000 | | 105.000.000 | |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 136.857.405.600 | | 136.874.314.750 | | 134.125.000.000 | | 134.282.250.000 | | 134.922.200.000 | | 135.365.000.000 | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Meningkatkan Pencapaian SPM Kota Batam | Persentase Pencapaian SPM Kota Batam (Dengan Persatuan: Persentase) (Dengan Satuan:Angka) | 94 | 94 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 95 | 95.5 | 95.5 | 96 | 96 | 96.5 | 96.5 | KEPALA BAGIAN T A T A PEMERINTAHAN |
| | Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat | Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka) | 89.91 | 89.91 | 89.94 | 89.94 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 90.00 | 90.00 | 90.03 | 90.03 | 90.07 | 90.07 | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif | Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KEPALA BAGIAN HUKUM |
| | Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU | Persentase MoU yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KEPALA BAGIAN KERJASAMA |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | 6.639.269.000 | 4.917.014.050 | 5.060.000.000 | 5.125.000.000 | 5.185.000.000 | 5.235.000.000 | 5.185.000.000 | 5.125.000.000 | 5.185.000.000 | 5.185.000.000 | 5.235.000.000 | 5.235.000.000 | |
| | Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | 539.310.000 | 539.310.000 | 575.000.000 | 585.000.000 | 600.000.000 | 615.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | |
| | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan Dokumen) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | 903.092.000 | 103.092.000 | 935.000.000 | 965.000.000 | 985.000.000 | 995.000.000 | 965.000.000 | 965.000.000 | 985.000.000 | 985.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 | |
| | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan Dokumen) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 5.196.867.000 | 4.274.612.050 | 3.550.000.000 | 3.575.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.575.000.000 | 3.575.000.000 | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | 3.625.000.000 | 3.625.000.000 | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program/Output Daerah (Dengan Satuan Dokumen) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Program/Output Daerah (Dengan Satuan Dokumen) | 2 Dokumen | 126.174.185.600 | 127.111.176.400 | 124.960.000.000 | 124.845.000.000 | 125.175.000.000 | 124.960.000.000 | 124.845.000.000 | 125.175.000.000 | 125.280.000.000 | 125.175.000.000 | 125.280.000.000 | 125.280.000.000 | 125.280.000.000 | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:Angka) | 100 | 87.332.117.000 | 89.495.089.200 | 85.525.000.000 | 85.550.000.000 | 85.575.000.000 | 85.525.000.000 | 85.550.000.000 | 85.575.000.000 | 85.600.000.000 | 85.575.000.000 | 85.600.000.000 | 85.600.000.000 | 85.600.000.000 | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan Dokumen) | 24 Dokumen | 26.764.446.000 | 23.766.000.000 | 27.275.000.000 | 27.100.000.000 | 27.325.000.000 | 27.275.000.000 | 27.100.000.000 | 27.325.000.000 | 27.330.000.000 | 27.325.000.000 | 27.330.000.000 | 27.330.000.000 | 27.330.000.000 | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen) | 200 Dokumen | 11.122.017.600 | 12.938.087.200 | 11.175.000.000 | 11.200.000.000 | 11.225.000.000 | 11.175.000.000 | 11.200.000.000 | 11.225.000.000 | 11.250.000.000 | 11.225.000.000 | 11.250.000.000 | 11.250.000.000 | 11.250.000.000 | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Diatraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusakaan, Keartisan, dan Trantibum Limmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Diatraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusakaan, Keartisan, Trantibum Limmas (Dengan Satuan Dokumen) | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 955.605.000 | 912.000.000 | 985.000.000 | 995.000.000 | 1.050.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | |
| 4.01.02.2.02.0004 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Dengan Satuan:Keluarga) | 1410 Keluarga | 900 Keluarga | 494.986.000 | 617.714.800 | 705.000.000 | 740.000.000 | 755.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 | 900 Keluarga | 900 Keluarga | 900 Keluarga | 900 Keluarga | |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan Dokumen) | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 11.951.000 | 11.949.900 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus) | 8 Kasus | 8 Kasus | 479.717.000 | 602.489.000 | 650.000.000 | 675.000.000 | 685.000.000 | 705.000.000 | 705.000.000 | 8 Kasus | 8 Kasus | 8 Kasus | 8 Kasus | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | 3.318.000 | 3.275.900 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|--|--|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan: Dokumen) | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 410 Dokumen | |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | 3.548.965.000 | 4.228.409.500 | | 3.400.000.000 | 3.572.250.000 | 3.807.200.000 | 4.055.000.000 | | | | | | |
| | Terlaksananya dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai | Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai (Dengan Satuan: Persentase) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | 3.380.000.000 | 4.080.000.000 | | 3.100.000.000 | 3.197.250.000 | 3.357.200.000 | 3.530.000.000 | | | | | | |
| | Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan: Dokumen) | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | 53.190.000 | 42.775.500 | | 150.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | | | | | | |
| | Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan: Dokumen) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | 115.775.000 | 105.634.000 | | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | | | | | | |
| | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan: Laporan) | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 2.437.205.400 | 2.264.315.600 | | 2.825.000.000 | 3.415.000.000 | 3.220.000.000 | 3.390.000.000 | | | | | | |
| | Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan: Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pembangunan | Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Dengan Prioritas (Dengan Satuan:Persentase) | 0 | 95 | 95 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. (Dengan Satuan:Angka) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 763.130.000 | 852.296.900 | 1.010.000.000 | 1.035.000.000 | 1.070.000.000 | 1.095.000.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti | Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 115.680.000 | 85.428.500 | 154.250.000 | 145.000.000 | 165.000.000 | 175.000.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan: Dokumen) | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 563.860.000 | 491.965.000 | 585.000.000 | 595.000.000 | 605.000.000 | 615.000.000 | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan) | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 83.590.000 | 94.153.400 | 90.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 105.000.000 | | | | | | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|--|---|------------------|---------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Terlaksananya Perencanaan dan Pelaksanaan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dengan Satuan Dokumen) | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 0 | 4 Dokumen | 180.750.000 | 4 Dokumen | 180.750.000 | 4 Dokumen | 200.000.000 | 4 Dokumen | 200.000.000 | 4 Dokumen | 200.000.000 | - |
| 4.01.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dengan Satuan Dokumen) | | 2 | | 2 | 146.869.000 | 2 | 146.869.000 | 2 | 730.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 460.000.000 | - |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan | Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan (Dengan Satuan:Angka) | 96 | 96 | | 96.5 | | 97 | | 97.5 | | 98 | | 98.5 | | - |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Dokumen) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 4 Dokumen | 60.720.000 | 4 Dokumen | 60.720.000 | 4 Dokumen | 125.000.000 | 4 Dokumen | 150.000.000 | 4 Dokumen | 175.000.000 | - |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan) | 1 Laporan | 1 Laporan | | 12 Laporan | 53.230.000 | 12 Laporan | 53.211.000 | 12 Laporan | 105.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 135.000.000 | - |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | 32.985.000 | | 32.938.000 | | 500.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | - |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|--------|------|------------|---------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | Tertindakannya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan Laporan) | 2 Laporan | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Laporan |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa | | | 1.366.740.400 | 1.109.377.700 | | 1.325.000.000 | 1.395.000.000 | 1.485.000.000 | 1.520.000.000 | | | | | | | |
| | Tertindakannya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa | Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Angka) | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | | | | | | |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa | | | 479.842.000 | 429.842.000 | | 375.000.000 | 400.000.000 | 425.000.000 | 450.000.000 | | | | | | | |
| | Tertindakannya Pengadaan Barang dan jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pengadaan Barang dan jasa (Dengan Satuan: Dokumen) | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Dokumen |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 794.326.400 | 586.964.700 | | 825.000.000 | 850.000.000 | 875.000.000 | 885.000.000 | | | | | | | |
| | Tertindakannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan: Dokumen) | 50 Dokumen | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | | | | | | | | Dokumen |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa | | | 92.572.000 | 92.571.000 | | 125.000.000 | 145.000.000 | 165.000.000 | 185.000.000 | | | | | | | |
| | Tertindakannya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa (Dengan Satuan:Orang) | 450 Orang | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Orang |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | 160.400.000 | 155.772.000 | | 225.000.000 | 255.000.000 | 285.000.000 | 315.000.000 | | | | | | | |
| | Tertindakannya rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| KODE | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen | 48.618.000 | 70.444.000 | 5 Dokumen | 75.000.000 | 85.000.000 | 5 Dokumen | 70.000.000 | 80.000.000 | 5 Dokumen | 95.000.000 | 105.000.000 | 5 Dokumen | 90.000.000 | - |
| 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Perindustrian | 5 Dokumen | 37.214.000 | 37.104.000 | 5 Dokumen | 60.000.000 | 70.000.000 | 5 Dokumen | 60.000.000 | 80.000.000 | 5 Dokumen | 80.000.000 | 90.000.000 | 5 Dokumen | 90.000.000 | - |
| 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 5 Dokumen | 74.568.000 | 48.224.000 | 5 Dokumen | 90.000.000 | 100.000.000 | 5 Dokumen | 90.000.000 | 110.000.000 | 5 Dokumen | 110.000.000 | 120.000.000 | 5 Dokumen | 120.000.000 | - |
| TOTAL: | | | | 263.579.126.049 | 270.810.337.027 | 282.809.088.079 | 284.087.168.564 | 286.503.580.761 | 289.658.389.672 | | | | | | | | |

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Daerah Kota Batam dengan Walikota Batam.

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kalaboratif, efektif dan efesien | | Nilai LPPD | 3.42 |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 84.5 |
| 1 | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat | Indeks Reformasi Hukum | 90 |
| | | | Indeks Kualitas Kebijakan | 84 |
| 2 | | Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing | Laju pertumbuhan ekonomi | 7.5% |
| 3 | | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan | Indeks kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam | 80 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Setdako Batam 2025

2.3. Program Dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Batam berjumlah 3 Program, yaitu 1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu sebesar Rp. 124.284.515.049 2.) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan total pagu sebesar Rp.136.857.405.600 3.) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan total pagu sebesar Rp. 2.437.205.400. Jumlah Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Batam sebanyak 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Total Pagu secara keseluruhan berdasarkan APBDP Sekretariat Daerah Kota Batam sebesar Rp, 263.579.126.049.

Tabel 4 Program dan Kegiatan

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 263,579,126,049 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | Indeks dan | 90.26 | 124,284,515,049 |
| | | Nilai SAKIP PD | Nilai | 72.46 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | % | 100% | 193,344,000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 106,258,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 Laporan | 87,086,000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | % | 100% | 55,287,953,967 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 215 Orang/bulan | 55,059,413,967 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 Dokumen | 228,540,000 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | % | 100% | 178,676,000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Orang | 14 Orang | 178,676,000 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|-----|---|--|---------|------------|----------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran | % | 100% | 12,361,013,440 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 Paket | 2,123,127,000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 7 Paket | 5,561,957,600 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 Paket | 575,390,000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 Laporan | 4,100,538,840 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Realisasi Pengadaan Barang milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan | % | 100% | 5,120,555,000 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 484,095,000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 Unit | - |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 245 Unit | 977,109,000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 160 Unit | 3,659,351,000 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan | % | 100% | 15,241,248,040 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 7,879,570,000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 576,889,000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 6,784,789,040 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik | % | 100% | 24,220,426,273 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 9 Unit | 352,960,000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 120 Unit | 15,953,168,000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 859 Unit | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 Unit | 7,914,298,273 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|-----|--|---|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima layanan Administrasi Keuangan | % | 100% | 6,182,189,929 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/bulan | 2 Orang/Bulan | 4,023,100,129 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang | 8 Orang | 28,000,000 |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/bulan | 2 Orang/Bulan | 2,131,089,800 |
| 9 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan | % | 100% | 4,170,676,500 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | 8 Paket | 2,683,840,700 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | 8 Paket | 1,486,835,800 |
| 10 | Penataan Organisasi | Nilai Kematangan Organisasi | Angka | 46 | 812,327,900 |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Dokumen | 4 Dokumen | 195,822,000 |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan | 3 Laporan | 233,416,000 |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 44 Dokumen | 98,034,000 |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana | Dokumen | 1 Dokumen | 236,850,900 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 48,205,000 |
| 11 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan | % | 100% | 516,104,000 |
| | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Laporan | 50 Laporan | 317,354,000 |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Laporan | 36 Laporan | 197,455,000 |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Laporan | 2 Laporan | 1,295,000 |
| B | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pencapaian SPM Kota Batam | % | 94% | 136,857,405,600 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat | Indeks | 89.91 | |
| | | Persentase Produk Hukum yang diimplementatif | % | 100% | |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|-----|--|---|----------|--------------|-----------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Persentase MoU yang ditindaklanjuti</i> | % | 100% | |
| 12 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Pemerintahan | % | 100 | 6,639,269,000 |
| | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adminstrasi Pemerintahan | Dokumen | 12 Dokumen | 539,310,000 |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Dokumen | 1 Dokumen | 903,092,000 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen | 3 Dokumen | 5,196,867,000 |
| 13 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan | % | 100 | 126,174,185,600 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | 24 Dokumen | 87,332,117,000 |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen | 200 Dokumen | 26,764,446,000 |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Dokumen | 14 Dokumen | 11,122,017,600 |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Keluarga | 900 Keluarga | 1,095,605,000 |
| 14 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasi dan disinkronisasikan | % | 100% | 494,986,000 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Dokumen | 410 Dokumen | 11,951,000 |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan | Kasus | 8 kasus | 479,717,000 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|-----|---|---|---------|-------------|---------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Hukum | | | |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi | Dokumen | 410 dokumen | 3,318,000 |
| 15 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang dicapai | % | 100% | 3,548,965,000 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Dokumen | 20 Dokumen | 3,380,000,000 |
| | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Dokumen | 1 Dokumen | 53,190,000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Laporan | 1 Laporan | 115,775,000 |
| C | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian | % | 100% | 2,437,205,400 |
| | | Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas | % | 95% | |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 85 | |
| | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan | % | 100% | |
| 16 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | % | 100% | 763,130,000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen | 6 Dokumen | 115,680,000 |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan | 4 Laporan | 563,860,000 |
| | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dokumen | 5 Dokumen | 83,590,000 |
| 17 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan | % | 96% | 146,935,000 |
| | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 60,720,000 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | SATUAN | 2025 | |
|-----|---|--|--------------|-------------|----------------------|
| | | | | TARGET | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Laporan | 1 Laporan | 53,230,000 |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 2 Laporan | 32,985,000 |
| 18 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 85 | 1,366,740,400 |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | dokumen | 150 Dokumen | 479,842,000 |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | dokumen | 250 Dokumen | 794,326,400 |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | orang | 450 Orang | 92,572,000 |
| 19 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti | % | 100% | 160,400,000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Dokumen | 5 Dokumen | 48,618,000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Dokumen | 5 Dokumen | 37,214,000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Dokumen | 5 Dokumen | 74,568,000 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di tetapkan sebagai berikut :

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi p rogres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91% - 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% - 90% | Tinggi |
| 3 | 66% - 75% | Sedang |
| 4 | 51% - 65% | Rendah |
| 5 | <50% | Sangat Rendah |

Sumber: Bimbingan Teknis SmartID

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|---|--|---|-----------|---|-----------|----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Efektif dan Efisien | | Nilai LPPD | 3.41 | Nilai Belum dikeluarkan oleh Kemendagri | NA | NA | Bagian Tata Pemerintahan |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 84.25 | 84.02 | 99.73 | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan | Indeks Kepuasan masyarakat Di Sekretariat Daerah Kota Batam | 75 | 95 | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | 90.26 | 90.59 | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Nilai SAKIP PD | 72.46 | 70.59 | 97% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | 100 | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 215 Orang/Bulan | 215 Orang/Bulan | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 14 Orang | 14 Orang | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|--|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | SKPD | | | | | |
| | | | Persentase Realisasi Pengadaan Barang milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | 0 | 0% | Sangat Rendah | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 245 Unit | 190 | 77.51% | Sedang | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 160 Unit | 101 | 63% | Sedang | Bagian Umum |
| | | | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan | 100% | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 9 Unit | 9 Unit | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laoangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 120 Unit | 120 Unit | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 859 Unit | 0 | 0% | Sangat Rendah | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 10 Unit | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 8 Orang | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | Tinggi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | | Persentase Kegiatan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang | 8 Paket | 8 Paket | 100% | Tinggi | Bagian Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|---|------------|------------|-----------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Disediakan | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 8 Paket | 100% | Tinggi | Bagian Umum |
| | | | Nilai Kematangan Organisasi | 46 | 46 | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Organisasi |
| | | | Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 50 Laporan | 50 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 36 Laporan | 36 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---|--|------------|------------|-----------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel dan Bersih Untuk Melayani Seluruh Masyarakat | Indeks Reformasi Hukum | 90 | 86.1 | 95.67 | Tinggi | Bagian Hukum |
| | | | Indeks Kualitas Kebijakan | 84 | 55.50 | 66.07 | Sedang | Bagian Hukum |
| | | | Persentase Pencapaian SPM Kota Batam | 94% | 97.10% | 100% | Tinggi | Bagian Tata Pemerintahan |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat | 89.91 | 90.35% | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Persentase Produk Hukum yang diimplementatif | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Hukum |
| | | | Persentase MoU yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Kerja Sama |
| | | | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100 | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Tata Pemerintahan |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Tata Pemerintahan |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Tata Pemerintahan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB-KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|---|--------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Tata Pemerintahan |
| | | | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan | 100 | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 900 Keluarga | 1250 Keluarga | 100% | Tinggi | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasi dan disinkronisasikan | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Hukum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---|---|-------------|-------------|--------------|----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Hukum |
| | | | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 8 kasus | 8 kasus | 100% | Tinggi | Bagian Hukum |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi | 410 dokumen | 410 dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Hukum |
| | | | Persentase Jumlah Dokumen Fasilitas Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang dicapai | 100% | 100 | 100% | Tinggi | Bagian Kerja Sama |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 20 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Kerja Sama |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Kerja Sama |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Kerja Sama |
| | | Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 7% | 6.89% | 98,42% | Tinggi | Bagian Perekonomian |
| | | | Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Perekonomian |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB-KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <i>Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas</i> | 95% | 95% | 100% | Tinggi | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | <i>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</i> | 85 | 85 | 100% | Tinggi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan</i> | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Sumber Daya Alam |
| | | | <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti</i> | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Perekonomian |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Perekonomian |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Perekonomian |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Perekonomian |
| | | | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan</i> | 96% | 96% | 100% | Tinggi | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Administrasi Pembangunan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN, TUJUAN, PROGRAM/KEG/SUB-KEG | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--------|---------|--|-------------|-------------|-----------|----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | Tinggi | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 85 | 85 | 100% | Tinggi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450 Orang | 450 Orang | 100% | Tinggi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | Tinggi | Bagian Sumber Daya Alam |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Sumber Daya Alam |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perlambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Sumber Daya Alam |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | Tinggi | Bagian Sumber Daya Alam |

Sumber: RP-JMD Kota Batam & E-Money TW IV Bag. Adpemb

a) Kategori “Sangat Rendah”

Pada Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi terdapat 2 Sub kegiatan yang memiliki Kategori “Sangat Rendah” yaitu

- 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tidak Terlaksana karena anggaran atau pagu sudah NOL, dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2026.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena anggaran pada sub kegiatan tersebut sudah NOL pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2025.

b) Kategori “Rendah”

Pada tahun 2025 Tidak Terdapat Kategori “RENDAH” Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam cukup Maksimal.

c) Kategori “Sedang”

Capaian Kinerja Organisasi terdapat 1 Sasaran yang ada pada bagian Hukum dan 2 Sub Kegiatan yang memiliki Kategori “Sedang” yaitu.

- 1) Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada Bagian hukum yang ter-realisis sebesar 55.50, nilai tersebut sudah dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan termasuk kedalam predikat penilaian “Sedang”
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 245 unit dan ter-realisis sebesar 190 unit hanya sebesar 77,51% Hal ini tergantung ketersediaan mebel yang mengalami kerusakan
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 160 Unit dan ter-realisis sebesar 101 Unit sebesar 63% pada sub kegiatan ini peralatan dan mesin yang layak pakai hanya 59 Unit dan sisanya melalui pengadaan.

Selebihnya ada 54 Sub kegiatan yang memiliki kategori “Tinggi” dan “Sangat Tinggi” kegiatan tersebut terlaksana secara baik

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah memiliki 56 Sub Kegiatan 19 Kegiatan dengan jumlah program sebanyak 3 Program, untuk tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Memiliki 54 Sub Kegiatan dan 19 Kegiatan serta 3 Program, untuk lebih jelasnya tertuang pada tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah; | 1) 70-80; | 89.01 | 100 | A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | 90.26 | 90.59 | 100% |
| | | Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB | 2) 20% | 0 | 0 | | | Nilai SAKIP PD | 72.46 | 70.59 | 97% |
| A.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | A.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | 100% | 100 | 100% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen | 100% |

| N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|-----------|------|--|--|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| A.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | 100% | A. 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 215 Orang/bulan | 215 Orang/bulan | 100% | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 215 Orang/bulan | 215 Orang/Bulan | 100% |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | KEGIATAN DITIADAKAN | | | | | | | | |
| A.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana | 100% | 100% | 100% | A. 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100% | 100% | 100% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 20 Orang | 16 Orang | 80% | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 14 Orang | 14 Orang | 100% |
| A.4 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan | 100% | 100% | 100% | A. 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran | 100% | 100% | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|------|---|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------|---|--|------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | 100% |
| A.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | 100% | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 9 Paket | 100% | A.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Realisasi Pengadaan Barang milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan | 100% | 100% | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100% | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | 0 | 0% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| A.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana | 100% | 100% | 100% | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 245 Unit | 190 | 77.51% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|------|---|--|----------------------------|------------|-----------|------|---|--|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | KEGIATAN DITIADAKAN | | | | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 2 Unit | 50% | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 160 Unit | 101 | 63% |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | 2 Unit | 50% | A. 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan | 100% | 100 | 100% |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 20 Unit | 100.00% | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| A.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | A. 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---------------|---------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| A.9 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 6 Paket | 75% | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 8 Orang | 100% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 7 Paket | 87.50% | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100% |
| A.10 | Penataan Organisasi | 1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik | 100% | 100% | 100% | A.9 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|---|--|------------|------------|-----------|-------|---|--|------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 36 Laporan | 36 Laporan | 100% | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | A. 11 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Keptokolan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| B | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian; | 100% | 100% | 100% | | Fasilitasi Keptokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptokolan | 50 Laporan | 50 Laporan | 100% |
| | | Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan; | 100% | 100% | 100% | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 36 Laporan | 36 Laporan | 100% |
| B.1 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100% | B | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | | | Persentase Pencapaian SPM Kota Batam | 94% | 97.10% | 100% |
| | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00% | | Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat | 89.91 | 90.35% | 100% | |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00% | | Persentase Produk Hukum yang diimplementatif | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | Persentase MoU yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | |
|-----------------------------------|---|--|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | B. 1 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100 | 100% |
| B.2 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan | 100 | 98.66% | 96.16% | | Penalaan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | 100% |
| | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | 100% |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Sipil, Pencatatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100% | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-----------|-------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% | B. 2 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang layanan diberikan Sesuai Kebutuhan | 100 | 100% |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 1068 Keluarga | 904 Dokumen | 84,64% | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 24 Dokumen | 100% |
| B.3 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan | 100% | 100% | 100% | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan | 200 Dokumen | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|------|---|--|--------------|---------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 88.10% | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 8 kasus | 9 Kasus | 100% | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 900 Keluarga | 1250 Keluarga | 100% |

| N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|------|---|--|-------------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | |
| | | | 410 dokumen | 757 Dokumen | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| B.4 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | <p>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi</p> <p>1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah;</p> <p>2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP</p> | 100% | 100% | 100% | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasi dan disinkronisasikan | 410 Dokumen | 410 Dokumen | 100% |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100% | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 8 kasus | 8 kasus | 100% |
| | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi | 410 dokumen | 410 dokumen | 100% |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang dicapai | 100% | 100 | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| C | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa | 70-80 | 89.01 | 100% | | Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 20 Dokumen | 24 Dokumen | 100% |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | | | Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| C.1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | C | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | | | | Persentase Realisasi Fisik Kegiatan Keunggulan Prioritas | 95% | 95% |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan | 100% | 100% | 100% |
| | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | C.1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang | 100% | 100% | 100% |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | | |
|------|--|---|--------------------------|-------------|-----------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> |
| | | | | | | | | | | | | |
| C.2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Waktu dan Ketentuan | 100% | 100% | 100% | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | |
| | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | C. 2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan | 96% | 96% | 100% | |
| C.3 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Tingkat Kematangan UKPBJ (level) | Level 4 untuk 4 Variabel | - | - | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 100% | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | |

| N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SU B KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB KEG | 2025 | | |
|------|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------|--|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik | 250 Dokumen | 150 Orang | 60% | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450 Orang | 450 Orang | 100% | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 85 | 85 | 100% |
| C.4 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan | 100% | 100% | 100% | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 100% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450 Orang | 450 Orang | 100% |

| N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2025 | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | C. 4 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase rekomendasi kebijakan bidang yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |

| N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2024 | | | N O. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | 2025 | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | | | | <i>Berdasarkan permendagri 90</i> | | | |
| | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |

Sumber: LKJIP Sekretariat Daerah Th. 2020 & LKPJ Sekretariat Daerah 2023

Tabel 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2025 | Target Akhir 2025 | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|---|---|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/5*100 |
| 1 | Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kalaboratif, efektif dan efisien | | Nilai LPPD | NA | 3.42 | Nilai Belum dikeluarkan oleh Kemendagri |
| 2 | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 84.02% | 84.5 | 99.43% |
| 3 | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat | Indeks Reformasi Hukum | 90.00% | 90 | 100.00% |
| | | | Indeks Kualitas Kebijakan | 85.00% | 84 | 100.00% |
| 4 | | Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing | Laju pertumbuhan ekonomi | 6.89% | 7.5% | 95.57% |
| 5 | | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan | Indeks kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam | 90.25% | 80 | 100.00% |

Sumber: RFK Bagian Adpemb Setdako

3.3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 3 Program, 19 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Tabel 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|---|---|----------|----------------------------|--------|-----------|---|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan Koordinasi, fasilitas dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kalaboratif, efektif dan efisien | | | Nilai LPPD | 3.42 | NA | Nilai Belum dikeluarkan oleh Kemendagri | Belum Sepenuhnya Berhasil | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 84.5 | 84.02% | 99.43% | Berhasil | |
| | | | | Indeks Reformasi Hukum | 90 | 90.00% | 100.00% | Berhasil | |
| 2 | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat | | Indeks Kualitas Kebijakan | 84 | 85.00% | 100.00% | Berhasil | |
| 3 | | Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing | | Laju pertumbuhan ekonomi | 7.5% | 6.69% | 95.57% | Berhasil | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|--------|--|--|---|--------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan | | Indeks kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam | 80 | 90.25% | 100.00% | Berhasil | |
| 5 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | 100% | 100% | 100% | Berhasil | Belanja Cetak RENJA, RENSTRA Serta Perubahannya, LAP, KEUANGAN, DPA, LKJIP, SAKIP |
| 6 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | Honor Pengelola Keuangan dan BMD |
| 7 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100% | 100% | 100% | Berhasil | Jumlah orang yang mengikuti Bimtek |
| 8 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|--------|---------|---|--|--------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Realisasi Pengadaan Barang Daerah milik Sesuai Rencana Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 10 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 11 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 12 | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima layanan Administrasi Keuangan | 100% | 66% | 66% | Belum Sepenuhnya Berhasil | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak Terlaksana |

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|--------|---------|---|--|--------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Rumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 14 | | | Penataan Organisasi | Nilai Kematangan Organisasi | 46% | 46% | 100% | Berhasil | |
| 15 | | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 16 | | | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 17 | | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|--------|---------|------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan | | | | | |
| 18 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasi dan disinkronisasikan | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 19 | | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang dicapai | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |
| 20 | | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Keterangan |
|-----|--------|---------|---------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan | 96% | 96% | 100% | Berhasil | Data Evaluasi TW 1 s/d 4 |
| 22 | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 85% | 85% | 100% | Berhasil | Data Jumlah Paket yang terealisasi |
| 23 | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | Berhasil | |

Tabel 9 Tabel Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Serta Kegiatan

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Meningkatkan Koordinasi, fasilitas dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kalaboratif, efektif dan efisien | | Nilai LPPD | | | 3.42 | NA | Tidak Menunjang |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | 84.5 | 84.02% | Menunjang |
| | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat | Indeks Reformasi Hukum | | | 90 | 90.00% | Menunjang |
| | | Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing | Indeks Kualitas Kebijakan | | | 84 | 85.00% | Menunjang |
| | | | Laju pertumbuhan ekonomi | | | 7.5% | 6.69% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|--|---|---|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan | Indeks kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam | | | 80 | 90.25% | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | 90.59 | 100% | Menunjang |
| | | | | | Nilai SAKIP PD | 70.59 | 97% | Menunjang |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | 100 | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | 100 | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 215 Orang/Bulan | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | 12 Dokumen | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menuju/Tidak Menuju |
|-----|--------|---------|-------------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 190 | 77.51% | Tidak Menuju |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 101 | 63% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Perencanaan | 100 | 100% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 100% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 100% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 100% | Menuju |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 9 Unit | 100% | Menuju |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laoangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 120 Unit | 100% | Menuju |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 | 0% | Tidak Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 100% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Kegiatan Rumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|--|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Penataan Organisasi | Nilai Organisasi | 46 | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 4 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | 100% | Menunjang |
| | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi | 44 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 50 Laporan | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 36 Laporan | 100% | Menunjang |
| | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 2 Laporan | 100% | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pencapaian SPM Kota Batam | 97.10% | 100% | Menunjang |
| | | | | | Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat | 90.35% | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|---|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | <i>Persentase Produk Hukum yang diimplementatif</i> | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | | <i>Persentase MoU yang ditindaklanjuti</i> | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100 | 100% | Menunjang |
| | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adminstrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan | 100 | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 24 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Dan Pencatatan Sipil, | 200 Dokumen | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|--|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 14 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 1250 Keluarga | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasi dan disinkronisasikan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 410 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 8 kasus | 100% | Menunjang |
| | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi | 410 dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | 100 | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|---|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | yang dicapai | | | |
| | | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 24 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 100% | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | | Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas | 95% | 100% | Menunjang |
| | | | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 85 | 100% | Menunjang |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 6 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 100% |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|--|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 5 Dokumen | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan | 96% | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 85 | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Dokumen | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 250 Dokumen | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450 Orang | 100% | 100% | Menunjang |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Capaian Indikator % | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--------|---------|-------------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 5 Dokumen | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 5 Dokumen | 100% | Menunjang |

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua kegiatan pada tahun 2025 ini memiliki rata-rata tingkat keberhasilan sebesar 98%, meskipun masih juga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan keterlibatan pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat khususnya bagi pihak internal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak eksternal seperti pihak ke-3.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan serta visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.
2. Adanya keterlibatan dari daerah lain dan pihak ke-3 melalui kegiatan Kesepakatan Bersama, CSR dan lain lain, untuk mendukung beberapa program/kegiatan yang ada di Seretariat Daerah Kota Batam.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa kegiatan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya pendukung, baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja. Seperti halnya pada ketersediaan alat elektronik berupa komputer yang mendukung pelaksanaan tugas secara teknis. Kurangnya pengadministrasian kepegawaian, sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2025 akan dilaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.

2. Belum Maksimalnya evaluasi setiap bulan maupun triwulan dalam pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil;
3. Capaian hasil (Outcome) pada Sekretariat Daerah Kota Batam umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaiannya kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya pencapaian target kinerja akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
4. Alokasi sudah di tempatkan sesuai dengan pos-pos masing-masing Sub Kegiatan akan tetapi masih ada anggaran yang ditetapkan belum sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

3.4. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam terdapat 3 Program 19 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan Berdasarkan APBD-Perubahan tahun 2025 dengan rata-rata pencapaian Program dan Kegiatan sebesar 89,74% dan total persentase mencapai 88,90%, Untuk lebih jelasnya Capaian Anggaran Program dan Kegiatan dijelaskan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) | %Capaian |
|----------|---|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sekretariat Daerah Kota Batam | 263,579,126,049 | Rp. 234,312,101,416 | 88.90% |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 124,284,515,049 | Rp. 103,666,326,230 | 83.41% |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 193,344,000 | Rp. 187,764,900 | 97.11% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 106,258,000 | Rp. 103,567,900 | 97.47% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 87,086,000 | Rp. 84,197,000 | 96.68% |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 55,287,953,967 | Rp. 50,317,952,089 | 91.01% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 55,059,413,967 | Rp. 50,103,422,089 | 91.00% |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 228,540,000 | Rp. 214,530,000 | 93.87% |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 178,676,000 | Rp. 164,874,020 | 92.28% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 178,676,000 | Rp. 164,874,020 | 92.28% |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12,361,013,440 | Rp. 11,019,009,332 | 89.14% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2,123,127,000 | Rp. 2,032,422,000 | 95.73% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5,561,957,600 | Rp. 4,717,499,927 | 84.82% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 575,390,000 | Rp. 473,986,750 | 82.38% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4,100,538,840 | Rp. 3,795,100,655 | 92.55% |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5,120,555,000 | Rp. 4,724,092,000 | 92.26% |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 484,095,000 | Rp. 423,700,000 | 87.52% |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | Rp. 0 | 0.00% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) | %Capaian |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pengadaan Mebel | 977,109,000 | Rp. 917,058,000 | 93.85% |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3,659,351,000 | Rp. 3,383,334,000 | 92.46% |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15,241,248,040 | Rp. 12,054,971,105 | 79.09% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7,879,570,000 | Rp. 6,598,413,902 | 83.74% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 576,889,000 | Rp. 512,098,000 | 88.77% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6,784,789,040 | Rp. 4,944,459,203 | 72.88% |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24,220,426,273 | Rp. 17,454,133,710 | 72.06% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 352,960,000 | Rp. 282,725,500 | 80.10% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15,953,168,000 | Rp. 9,508,593,410 | 59.60% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | Rp. 0 | 0.00% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7,914,298,273 | Rp. 7,662,814,800 | 96.82% |
| 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 6,182,189,929 | Rp. 3,121,792,672 | 50.50% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4,023,100,129 | Rp. 1,013,392,672 | 25.19% |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 28,000,000 | Rp. 0 | 0.00% |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2,131,089,800 | Rp. 2,108,400,000 | 98.94% |
| 9 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 4,170,676,500 | Rp. 3,402,631,502 | 81.58% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2,683,840,700 | Rp. 2,306,026,442 | 85.92% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1,486,835,800 | Rp. 1,096,605,060 | 73.75% |
| 10 | Penataan Organisasi | 812,327,900 | Rp. 748,334,400 | 92.12% |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 195,822,000 | Rp. 183,781,100 | 93.85% |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 233,416,000 | Rp. 224,296,000 | 96.09% |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 98,034,000 | Rp. 81,983,500 | 83.63% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) | %Capaian |
|-----------|--|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 236,850,900 | Rp. 220,141,800 | 92.95% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 48,205,000 | Rp. 38,132,000 | 79.10% |
| 11 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 516,104,000 | Rp. 470,770,500 | 91.22% |
| | Fasilitasi Keprotokolan | 317,354,000 | Rp. 284,350,500 | 89.60% |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 197,455,000 | Rp. 185,150,000 | 93.77% |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1,295,000 | Rp. 1,270,000 | 98.07% |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 136,857,405,600 | Rp. 128,542,256,260 | 93.92% |
| 12 | Administrasi Tata Pemerintahan | 6,639,269,000 | Rp. 6,142,289,500 | 92.51% |
| | Penataan Administrasi Pemerintahan | 539,310,000 | Rp. 506,071,000 | 93.84% |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 903,092,000 | Rp. 882,499,000 | 97.72% |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 5,196,867,000 | Rp. 4,753,719,500 | 91.47% |
| 13 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 126,174,185,600 | Rp. 118,812,784,660 | 94.17% |
| | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 87,332,117,000 | Rp. 84,184,181,259 | 96.40% |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 26,764,446,000 | Rp. 25,805,680,000 | 96.42% |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 11,122,017,600 | Rp. 7,804,423,401 | 70.17% |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 1,095,605,000 | Rp. 1,018,500,000 | 92.96% |
| 14 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 494,986,000 | Rp. 446,120,100 | 90.13% |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 11,951,000 | Rp. 11,588,000 | 96.96% |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | 479,717,000 | Rp. 431,457,100 | 89.94% |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 3,318,000 | Rp. 3,075,000 | 92.68% |
| 15 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 3,548,965,000 | Rp. 3,141,062,000 | 88.51% |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 3,380,000,000 | Rp. 2,990,910,000 | 88.49% |
| | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 53,190,000 | Rp. 44,417,000 | 83.51% |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 115,775,000 | Rp. 105,735,000 | 91.33% |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) | %Capaian |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2,437,205,400 | Rp. 2,103,518,926 | 86.31% |
| 16 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 763,130,000 | Rp. 590,840,000 | 77.42% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 115,680,000 | Rp. 25,440,000 | 21.99% |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 563,860,000 | Rp. 506,095,000 | 89.76% |
| | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 83,590,000 | Rp. 59,305,000 | 70.95% |
| 17 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 146,935,000 | Rp. 140,128,000 | 95.37% |
| | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 60,720,000 | Rp. 59,500,000 | 97.99% |
| | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 53,230,000 | Rp. 48,930,000 | 91.92% |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 32,985,000 | Rp. 31,698,000 | 96.10% |
| 18 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1,366,740,400 | Rp. 1,217,481,726 | 89.08% |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 479,842,000 | Rp. 364,923,326 | 76.05% |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 794,326,400 | Rp. 773,477,000 | 97.38% |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 92,572,000 | Rp. 79,081,400 | 85.43% |
| 19 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 160,400,000 | Rp. 155,069,200 | 96.68% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 48,618,000 | Rp. 47,452,200 | 97.60% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 37,214,000 | Rp. 34,177,000 | 91.84% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 74,568,000 | Rp. 73,440,000 | 98.49% |

Sumber: e-money Bag. Adpemb Setdako Batam

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari Penjabaran pada bab 3 dapat kita ketahui bahwa Kinerja Sekretariat Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 88.90% berdasarkan data e-monev bagian Administrasi Pembangunan dapat dikategorikan berdasarkan penilaian SmartID yaitu “**Tinggi**”, hal ini dapat dilihat pada ihtisar pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang memiliki korelasi langsung antara e-monev bagian Administrasi Pembangunan terhadap RPJMD Kota Batam 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah dipadu-serasikan dengan RPJMD Kota Batam 2025-2029.

4.2. Saran

Dalam rangka perbaikan kinerja OPD ke depan beberapa hal yang dapat menjadi saran, adalah:

1. Hasil pengukuran kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua bidang untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinergi program agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dan sinergi.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan meningkatkan Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi dan lembaga serta mitra kerja Sekretariat Daerah Kota Batam.
5. Capaian Kinerja tahun 2025 akan menjadi kondisi awal pada Rencana Strategis Sekretariat Kota Batam tahun 2025-2029. Dengan demikian dalam penyusunan

target kinerja dapat disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Batam 2025-2029 dengan menselaraskan kondisi internal dan eksternal serta peluang dan tantangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP/LAKIP) tahun 2025 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 03 Februari 2026
Sekretaris Daerah Kota Batam



FIRMANSYAH

